

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *good governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002).

United Nations Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa *governance* adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. *Governance* bisa dikatakan baik atau *good* apabila sumber daya dan *problem* yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien. Sehingga *good governance* adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen dalam menerapkan pemerintahan yang baik atau *good governance* untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada. *Good governance* diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan *good governance* merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya sistem politik mayoritas pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan menganut norma-norma demokrasi yang universal (Budiawan & Nuryati, 2022).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam taraf masyarakat sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kedudukan pemerintah desa dalam tatanan sistem pemerintahan merupakan organisasi

pemerintah terendah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kedudukan tersebut menempatkan desa sebagai sentral dari program-program kegiatan pemerintah terutama yang datang dari atas. Dengan demikian pemerintah desa dituntut untuk dapat berfungsi secara maksimal dalam mengemban tugas yang diserahkan.

Terwujudnya pemerintahan yang berkualitas yaitu pemerintahan yang mencapai tingkat kinerja dan layanan yang tinggi untuk masyarakatnya dengan berlandaskan prinsip *good governance* dan berfokus pada kepentingan umum. Oleh karena itu, perlu memasukkan prinsip-prinsip *good governance* ke dalam proses pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) (dalam Sedarmayanti, 2009) mengemukakan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang mencerminkan sistem pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Keempat prinsip tersebut harus bisa diterapkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk di Pemerintahan Desa Kanding, Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas untuk terwujudnya *good governance*.

Berikut penulis menyajikan data perangkat Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas:

Tabel 1. Data Perangkat Desa Kanding

No.	Nama	Jabatan	Tahun Jabatan	Umur	Pendidikan
1.	Awal Nurhandoko	Kepala Desa	2019-sekarang	54	SLTA
2.	Maryono	Sekretaris Desa	2016-sekarang	56	SLTA
3.	Defiet Anjar Asmara	Kepala Dusun I	2021-sekarang	43	S1
4.	Sudarno	Kepala Dusun II	2016-sekarang	58	SLTA
5.	Tuslam	Kepala Dusun III	2021-sekarang	58	SLTP
6.	Aris Budi Santosa	Kasi Pemerintahan	2016-sekarang	54	SLTA
7.	Ginanjur Lukmana	Kasi Kesejahteraan	2021-sekarang	35	S1
8.	Agus Budi Prihatin	Kasi Pelayanan	2016-sekarang	55	SLTA
9.	Sajim	Kaur TU dan Umum	2016-sekarang	48	SLTP
10.	Wastam	Kaur Keuangan	2016-sekarang	39	SLTA
11.	Menik Supriasih	Kaur Perencanaan	2017-sekarang	28	S1

Sumber: Pemerintah Desa Kanding, 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas, perangkat desa di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebagai pelaksana *good governance* masih mengalami kendala dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembinaan dan pengarahan awal dari pemerintah pusat. Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan sebelumnya, salah satu perangkat desa menyebutkan bahwa masih ada perangkat desa yang belum sesuai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok sesuai jabatan. Para perangkat Desa

Kanding juga belum transparan terhadap informasi dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat Desa Kanding yang masih rendah dan keterbatasan kemampuan perangkat desa untuk mengelola pemerintahan. Berikut merupakan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2021-2023:

Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kanding Tahun Anggaran 2021-2023

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	2021	2.374.545.420	2.377.442.809	2.897.389
2.	2022	2.585.801.175	2.620.663.616	34.862.441
3.	2023	2.453.626.147	2.093.448.239	360.177.908

Sumber: Kaur Keuangan Pemerintah Desa Kanding, 2023

Berdasarkan data tersebut, realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa para perangkat desa belum benar-benar memahami apa saja yang diperlukan serta apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan, rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa membuat perangkat desa menjadi kesulitan dalam menciptakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam memperkuat sistem pengawasan serta menegakkan aturan dan regulasi dengan ketat. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Good*

Governance pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas”.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

2. Dimensi Waktu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data tahun 2021-2024.

3. Dimensi Studi

Penelitian ini difokuskan pada *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang *Good*

Governance pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pemahaman keilmuan, menambah wawasan dan mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya *good governance*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang *good governance* kepada pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.